Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education
Vol. 7 No. 10 (2026), hlm. 189-203, DOI: 10.32832/itjmie.v7i10.24581
ISSN: 2654-5845 (Online)

Manajemen pendidikan ganda santri melalui kemitraan eksternal pesantren dengan sekolah menengah pertama formal

Amaliah Mu'milah*, Abd Hamid
Universitas Islam Malang, Indonesia
*amaliahmumilah@gmail.com

Abstract

Islamic boarding school institutions without formal educational unit licenses face unique challenges in holistically fulfilling their students' educational rights. This article examines the dynamics of dual education for santri at Yayasan Darul Qur'an Wal Lughoh Al Manshur, Pakis, Malang, which has established an external partnership with a formal junior high school due to the absence of an independent school establishment permit. The study aims to analyze institutional partnership patterns, coordination mechanisms, responsibility allocation, and the impact of dual education on students' learning experiences. A qualitative case study approach was employed, collecting data through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. Informants were purposively selected, including pesantren supervisors, partner school principals, teachers, students, and parents. Data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldaña model through data condensation, display, and conclusion drawing. Findings indicate that the partnership operates informally without binding cooperation agreements, resulting in sporadic coordination vulnerable to scheduling conflicts and value discontinuity. Students experience significant dual burdens in terms of time and academic demands, yet simultaneously develop resilience, cross-educational-culture adaptability, and a strong Islamic identity. This article asserts the urgency of formalizing partnerships through structured cooperation agreements and integrative curricula centered on students' needs. These findings contribute to Islamic education management scholarship, particularly regarding externally partnered dual education models that have received limited attention in existing literature.

***Keywords**: dual education; institutional pasrtnership; islamic education management; islamic boarding school.*

Abstrak

Lembaga pesantren yang belum memiliki izin satuan pendidikan formal menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi hak pendidikan santri secara holistik. Artikel ini mengkaji dinamika pendidikan ganda santri di Yayasan Darul Qur'an Wal Lughoh Al Manshur, Pakis, Malang, yang menjalin kemitraan eksternal dengan sebuah sekolah menengah pertama formal karena belum memiliki izin pendirian sekolah secara mandiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kemitraan kelembagaan, mekanisme koordinasi, pembagian tanggung jawab, serta dampak pendidikan ganda terhadap pengalaman belajar santri. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Informan dipilih secara purposif, meliputi pengelola pesantren, kepala sekolah mitra, guru, santri, dan orang tua. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemitraan berlangsung secara informal tanpa perjanjian kerja sama yang mengikat, sehingga koordinasi bersifat sporadis

Copyright (c) author/s (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)
Article Information: Submitted 16 July 2026, Accepted 10 October 2026, Published 31 October 2026

dan rentan terhadap benturan jadwal serta ketidakselarasan nilai pendidikan. Santri mengalami beban ganda yang signifikan dalam aspek waktu dan tuntutan akademik, namun pada saat yang sama mengembangkan ketahanan diri, kemampuan beradaptasi lintas budaya pendidikan, dan identitas keislaman yang kuat. Artikel ini menegaskan urgensi formalisasi kemitraan melalui perjanjian kerja sama yang terstruktur dan kurikulum integratif yang berpusat pada kebutuhan santri. Temuan ini berkontribusi pada kajian manajemen pendidikan Islam, khususnya mengenai model pendidikan ganda berbasis kemitraan eksternal yang masih relatif jarang mendapat perhatian dalam literatur yang ada.

Kata kunci: pendidikan ganda; kemitraan kelembagaan; manajemen pendidikan Islam, pesantren.

Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang secara historis memainkan peran sentral dalam transmisi keilmuan Islam, pembentukan karakter, dan reproduksi ulama. Jauh sebelum negara mengatur sistem pendidikan nasional, pesantren telah menjadi tulang punggung peradaban keilmuan Islam di Nusantara (Paramansyah & Aziz, 2025). Posisi strategis ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang secara eksplisit mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memberikan dasar hukum bagi pesantren untuk memperoleh pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi tanpa kehilangan kekhasan tradisi keilmuannya.

Perkembangan kuantitatif pesantren menunjukkan tren yang signifikan. Perkembangan lembaga pesantren di Indonesia menunjukkan tren yang semakin pesat dan memperkuat posisinya sebagai institusi pendidikan Islam yang berkontribusi penting dalam pembinaan keagamaan serta pengembangan sumber daya manusia, terutama di wilayah Pulau Jawa. Fakta ini menegaskan bahwa pesantren bukan lagi lembaga pinggiran, melainkan komponen vital ekosistem pendidikan nasional yang memengaruhi kehidupan belajar jutaan santri di seluruh Indonesia (Harahap dkk., 2025).

Akan tetapi, perkembangan pesantren tidak berjalan tanpa tantangan. Tekanan sosial dan tuntutan orang tua terhadap pendidikan formal mendorong banyak pesantren untuk mengembangkan satuan pendidikan formal di lingkungannya. Orang tua tidak hanya mengharapkan bekal agama dari pesantren, tetapi juga ijazah formal yang diakui negara sebagai modal mobilitas sosial dan ekonomi anak. Kondisi ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan formal harus memenuhi standar jalur, jenjang, kurikulum, akreditasi, dan sertifikasi yang ditetapkan negara.

Persoalan muncul ketika sebuah pesantren belum memiliki izin resmi untuk mendirikan satuan pendidikan formal sendiri. Kondisi ini ditemukan di Yayasan Darul Qur'an Wal Lughoh Al Manshur, Pakis, Malang sebuah pesantren yang secara aktif menyelenggarakan pendidikan keagamaan melalui ngaji Al-Qur'an, pengajian kitab, pembinaan ibadah, dan pembentukan karakter santri, namun belum dapat mengoperasikan SMP formal secara mandiri karena izin pendirian sekolah belum tuntas. Akibatnya, santri yang bermukim di pesantren diarahkan untuk mengikuti

pendidikan formal di SMP mitra di luar pengelolaan langsung yayasan. Fenomena serupa juga dijumpai di pesantren-pesantren pedesaan di kawasan seperti Desa Pancor Ketapang, Sampang, Madura, di mana keterbatasan infrastruktur legalitas formal mendorong pola kemitraan serupa antara lembaga pendidikan keagamaan dan sekolah formal di sekitarnya.

Situasi ini yang melatarbelakangi munculnya topik utama dalam kajian ini yang disebut sebagai pendidikan ganda santri: sebuah kondisi di mana seorang santri secara bersamaan menjalani dua sistem pendidikan yang berbeda secara fundamental sistem pesantren yang berorientasi pada *tafaqquh fid-dīn*, pengasuhan kiai, dan tradisi keilmuan Islam; serta sistem sekolah formal yang berorientasi pada kurikulum nasional, standar kompetensi, dan evaluasi akademik formal. Dua sistem ini memiliki logika internal, otoritas pedagogis, dan budaya belajar yang berbeda. Jika tidak dikelola secara terarah, keduanya berpotensi menimbulkan tumpang tindih jadwal, beban akademik berlebih, ketidaksinambungan nilai, dan tekanan psikologis pada santri.

Kajian terdahulu tentang integrasi pesantren dan pendidikan formal umumnya berfokus pada pesantren yang telah memiliki satuan pendidikan formal sendiri dan menjalankan integrasi kurikulum secara internal (Wahyuni & Aziz, 2026). Penelitian-penelitian tersebut menemukan berbagai tantangan seperti belum adanya dokumen kurikulum terpadu, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar unit, serta padatnya beban belajar santri. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pesantren tanpa izin satuan pendidikan formal yang membangun kemitraan eksternal dengan SMP formal sebagai model yang berbeda secara struktural masih sangat terbatas dalam literatur.

Kekosongan ini penting untuk diisi karena model kemitraan eksternal menghadirkan tantangan yang berbeda dari integrasi internal. Dalam model ini, pesantren tidak memiliki kontrol langsung atas kurikulum formal, jadwal sekolah, dan sistem evaluasi akademik santri. Di sisi lain, pesantren tetap bertanggung jawab penuh atas pengasuhan, ibadah, kedisiplinan, dan pembentukan karakter santri. Ketidakseimbangan kontrol ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana koordinasi kelembagaan berlangsung, bagaimana hak belajar santri dilindungi, dan bagaimana santri memaknai serta menyesuaikan diri dengan dua sistem yang berbeda tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pola kemitraan kelembagaan antara Yayasan Darul Qur'an Wal Lughoh Al Manshur dan SMP formal mitra; (2) mengidentifikasi mekanisme koordinasi dan pembagian tanggung jawab antar lembaga; (3) mendeskripsikan pengalaman santri dalam menjalani pendidikan ganda; dan (4) merumuskan implikasi temuan bagi pengembangan model pendidikan berbasis kemitraan eksternal. Kebaruan *(novelty)* penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pesantren tanpa satuan pendidikan formal yang beroperasi melalui kemitraan eksternal sebuah model yang memiliki karakter, dinamika, dan tantangan yang belum banyak dikaji secara sistematis dalam literatur manajemen pendidikan Islam.

Konsep pendidikan ganda *(dual education)* merujuk pada kondisi ketika seorang peserta didik secara bersamaan terlibat dalam dua sistem pendidikan yang memiliki tujuan, struktur, dan budaya yang berbeda. Dalam konteks pesantren, pendidikan ganda

terjadi ketika santri menjalani pendidikan keagamaan di pesantren sekaligus mengikuti pendidikan formal di satuan pendidikan umum. Berbeda dari model pendidikan terpadu *(integrated education)* di mana dua sistem dikelola dalam satu struktur kelembagaan, pendidikan ganda melalui kemitraan eksternal menempatkan santri di antara dua lembaga yang secara struktural berdiri sendiri dan berpotensi memiliki agenda yang tidak selaras.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki elemen dasar yang tidak berubah sejak awal kemunculannya: kiai sebagai figur sentral otoritas keagamaan dan keilmuan, santri sebagai peserta didik, masjid sebagai pusat ibadah dan pembelajaran, pondok sebagai tempat tinggal komunal, dan kitab kuning sebagai bahan ajar utama (Dhofier, 2011). Elemen-elemen ini membentuk suatu ekosistem pendidikan yang total dan menyeluruh tidak terbatas pada jam pelajaran, tetapi meliputi seluruh dimensi kehidupan santri selama dua puluh empat jam.

Sementara itu, pendidikan formal dalam sistem nasional diatur secara ketat oleh standar yang ditetapkan pemerintah, meliputi kurikulum, kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, dan akreditasi. Ketika santri diwajibkan mengikuti kedua sistem secara bersamaan tanpa mekanisme integrasi yang jelas, muncul apa yang disebut oleh (Rupert & Holmes, 1997) sebagai *dual institutional allegiance* loyalitas ganda terhadap dua lembaga dengan otoritas yang berbeda yang dapat menimbulkan disonansi kognitif dan tekanan identitas pada santri.

Kemitraan kelembagaan dalam konteks pendidikan merujuk pada hubungan kolaboratif antara dua atau lebih lembaga yang sepakat untuk berbagi sumber daya, tanggung jawab, dan tujuan demi peningkatan kualitas pendidikan peserta didik (Brinkerhoff, 2002). Kemitraan yang efektif mensyaratkan adanya: (a) kesetaraan posisi antar pihak; (b) saling menguntungkan *(mutuality);* (c) akuntabilitas bersama; dan (d) keberlanjutan hubungan yang diformalkan melalui dokumen perjanjian kerja sama (MoU).

Dalam kajian manajemen pendidikan Islam, (Ihsannuddin & Zakariyah, 2025) mengidentifikasi tiga model penyelenggaraan pendidikan Islam formal: model madrasah (integrasi internal sepenuhnya), model sekolah berbasis pesantren (semi-integrasi), dan model pesantren mitra sekolah (kemitraan eksternal). Model ketiga inilah yang menjadi fokus kajian ini, namun paradoksnya justru paling sedikit mendapat perhatian dalam literatur. (Gunawan & Citriadin, 2025) menambahkan bahwa keberhasilan kemitraan pendidikan bergantung pada kualitas komunikasi, kejelasan peran, kepercayaan antar lembaga, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji relasi pesantren dan pendidikan formal dengan berbagai pendekatan (Huda & Mahfud, 2024). Peneliti juga telah melakukan penelitian tentang penerapan manajemen kurikulum terpadu di pesantren modern dan menemukan bahwa integrasi kurikulum efektif ketika terdapat dokumen kurikulum bersama, koordinasi guru lintas bidang studi, dan sistem *monitoring* evaluasi yang konsisten.

Penelitian pertama ditulis oleh Oernika Mahanani dan Sulistyorini dengan judul penelitian Manajemen Kurikulum Terpadu, Studi Tentang Penerapan Model Kurikulum *Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah* (KMI) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA

Al-Rosyid Bojonegoro (Mahanani & Sulistyorini, 2023). Isu pendidikan yang diangkat dalam artikel tersebut ialah mendeskripsikan dan mengkaji model manajemen kurikulum terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah, khususnya madrasah yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mencapai mutu pendidikan madrasah di era zaman yang semakin berkembang ini, MA Al-Rosyid Bojonegoro menerapkan model kurikulum terpadu antara kurikulum kementerian Agama dengan kurikulum *Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah* (KMI), yang mana dalam pengimplementasiannya lembaga tersebut memfokuskan pada tiga tahapan fungsi manajemen, meliputi; pertama, perencanaan kurikulum KMI; kedua, pelaksanaan kurikulum KMI; dan ketiga, evaluasi kurikulum KMI. Penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan tentang integrasi penerapan pendidikan formal dan pesantren. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan isu penelitian yang diangkat dalam artikel ini yaitu beban ganda yang dialami santri yang mengenyam pendidikan agama di lembaga pesantren pedesaan. Di mana pesantren tersebut belum memiliki izin mendirikan lembaga pendidikan formal yang memaksa santri bersekolah di lembaga formal lain dengan ajaran dan budaya yang jauh berbeda dengan pesantren tempat mereka mengaji.

Penelitian kedua ditulis oleh Al-Qoroni & Romli (2026) dengan judul penelitian *Internalisasi Nilai-Nilai Kedisiplinan dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung, Bogor*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses internalisasi nilai disiplin pada mahasiswa STAI Nurul Iman yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai disiplin dilakukan melalui proses penanaman nilai, keteladanan, dan pembiasaan yang terintegrasi dalam program pendidikan keagamaan, pendidikan umum, serta pendidikan semi-militer. Proses tersebut membantu mahasiswa yang juga berstatus sebagai santri untuk menerima, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kedisiplinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pesantren. Penelitian tersebut sama-sama menyoroti proses internalisasi nilai-nilai yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan yang dikolaborasikan antara pendidikan agama dan pendidikan formal.

Akan tetapi, penelitian-penelitian di atas memiliki keterbatasan yang signifikan: semua dilakukan pada pesantren yang sudah memiliki satuan pendidikan formal sendiri. Tidak satu pun yang mengkaji secara mendalam pesantren yang beroperasi tanpa izin formal, membangun kemitraan eksternal dengan SMP yang secara struktural berdiri sendiri, dan menghadapi ketidakseimbangan kontrol atas proses pendidikan santrinya. Hal tersebutlah yang menjadi kebaruan isu dalam penelitian ini. Dengan mengangkat fenomena di Yayasan Darul Qur'an Wal Lughoh Al Manshur, kajian ini menawarkan perspektif baru tentang manajemen pendidikan ganda berbasis kemitraan eksternal yang lebih reflektif terhadap realitas pesantren kecil-menengah di Indonesia dengan tujuan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan dan solusi permasalahan di bidang pendidikan.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal *(single case study)* sebagaimana dikembangkan oleh (Yin, 2017). Desain ini dipilih karena fokus kajian adalah memahami fenomena pendidikan ganda secara mendalam dalam konteks kelembagaan yang spesifik, dengan memperhatikan kompleksitas hubungan antar lembaga dan pengalaman subjektif santri yang tidak dapat direduksi menjadi data numerik.

Kajian dilaksanakan di Yayasan Darul Qur'an Wal Lughoh Al Manshur, Desa Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebuah pesantren yang telah beroperasi selama lebih dari satu dekade dalam kapasitas pendidikan keagamaan informal, namun belum memiliki izin satuan pendidikan formal SMP. Sebagai perbandingan kontekstual, observasi tambahan dilakukan di beberapa pesantren serupa di kawasan pedesaan Sampang, Madura, termasuk di wilayah Desa Pancor Ketapang, yang menghadapi dinamika kemitraan serupa dengan sekolah formal di sekitarnya. Komparasi ini berfungsi memperkuat kedalaman analisis dan menghindarkan simpulan yang terlalu terikat pada satu konteks tunggal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam *(in-depth interview)* semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara *purposif*, mencakup pengasuh dan ustaz pesantren (3 orang), kepala sekolah dan guru SMP mitra (4 orang), santri dari berbagai angkatan (8 orang), serta orang tua/wali santri (5 orang); (2) observasi partisipan selama empat minggu untuk mendokumentasikan ritme harian santri, interaksi lintas lembaga, dan pola koordinasi; (3) analisis dokumen terhadap tata tertib pesantren, jadwal kegiatan, rapor akademik, dan korespondensi antar lembaga. Keabsahan data dijamin melalui *triangulasi sumber, member checking, dan peer debriefing* (Lincoln & Guba, 1985). Kredibilitas diperoleh melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pengasuh pesantren, kepala sekolah, guru, santri, dan orang tua, serta triangulasi teknik melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Selain itu, *member checking* dilakukan kepada sejumlah informan kunci untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi peneliti dengan pengalaman mereka. Analisis data mengikuti model interaktif (Miles dkk., 2014), melalui tiga tahap: kondensasi data (pemilahan, penyederhanaan, dan pengabstraksian data mentah), penyajian data dalam bentuk matriks dan narasi deskriptif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kode awal dihasilkan secara induktif dari transkrip wawancara dan catatan lapangan, kemudian dikembangkan menjadi kategori dan tema yang lebih abstrak melalui analisis komparatif konstan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pola kemitraan eksternal: Antara pragmatisme & informalitas

Temuan pertama kajian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara Yayasan Darul Qur'an Wal Lughoh Al Manshur dan SMP mitra dibangun atas dasar pragmatisme kelembagaan yang berkembang melalui relasi personal antar pemimpin lembaga, bukan sebagai hasil dari perencanaan strategis yang dirancang secara formal. Kemitraan tersebut tidak diawali dengan penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun bentuk perjanjian kerja sama tertulis lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh pesantren, inisiasi kemitraan berawal dari komunikasi informal antara

kiai pengasuh dan kepala sekolah SMP mitra yang sebelumnya telah memiliki hubungan sosial-keagamaan yang erat. Kondisi ini menunjukkan bahwa terbentuknya kemitraan lebih dipengaruhi oleh modal sosial berupa kepercayaan (*trust*), kedekatan hubungan, serta kesamaan visi dalam penyelenggaraan pendidikan dibandingkan oleh mekanisme administratif yang bersifat formal.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa dalam konteks lembaga pendidikan berbasis pesantren, relasi interpersonal sering kali menjadi faktor dominan yang mempercepat lahirnya kerja sama antar lembaga. Kepercayaan yang telah terbangun melalui interaksi sosial memungkinkan kedua belah pihak mengurangi biaya koordinasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan membangun komitmen bersama tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. Dengan demikian, absennya dokumen kerja sama formal pada tahap awal tidak serta-merta menunjukkan lemahnya hubungan kelembagaan, melainkan mencerminkan karakter tata kelola pesantren yang lebih mengedepankan nilai amanah, ukhuwah, dan kepercayaan sebagai fondasi kerja sama. Meskipun demikian, pola kemitraan yang bertumpu pada hubungan personal juga berpotensi menimbulkan kerentanan kelembagaan apabila terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan kebijakan pada salah satu institusi. Oleh karena itu, keberlanjutan kemitraan memerlukan penguatan melalui mekanisme tata kelola yang lebih terstruktur agar hubungan kerja sama tidak hanya bergantung pada figur tertentu, tetapi memiliki legitimasi kelembagaan yang mampu menjamin kesinambungan program pendidikan dalam jangka panjang.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan (Brinkerhoff, 2002) yang menjelaskan bahwa kemitraan pada banyak lembaga pendidikan di negara berkembang umumnya berakar pada modal sosial yang dibangun melalui kepercayaan interpersonal, jaringan sosial, dan hubungan informal antar pemimpin lembaga, bukan semata-mata melalui desain kelembagaan yang bersifat formal. Dalam perspektif tersebut, kepercayaan menjadi modal awal yang mampu mempercepat terbentuknya kolaborasi karena masing-masing pihak telah memiliki keyakinan terhadap integritas, komitmen, dan tujuan bersama. Akan tetapi, Brinkerhoff juga menegaskan bahwa kemitraan yang terlalu bergantung pada figur tertentu dapat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan kepemimpinan. Kerentanan tersebut muncul karena pengetahuan, komitmen, dan mekanisme koordinasi lebih banyak melekat pada individu daripada terlembagakan dalam sistem organisasi.

Kondisi tersebut terkonfirmasi dalam kajian ini. Berdasarkan hasil wawancara, pergantian kepala SMP mitra pada tahun 2022 menyebabkan koordinasi antar lembaga mengalami penurunan selama beberapa bulan. Penurunan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh perubahan struktur organisasi, melainkan karena proses adaptasi kepemimpinan baru yang memerlukan waktu untuk membangun kembali kepercayaan, menyamakan persepsi mengenai tujuan kemitraan, serta memahami pola komunikasi yang sebelumnya telah terbentuk. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan kemitraan belum sepenuhnya ditopang oleh mekanisme kelembagaan yang baku, melainkan masih sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan personal antar pemimpin. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kemitraan melalui penyusunan kesepakatan formal, standar operasional kerja sama, dan mekanisme koordinasi yang

terdokumentasi menjadi kebutuhan strategis untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan, terlepas dari adanya dinamika pergantian kepemimpinan pada salah satu institusi.

Ketiadaan MoU memiliki implikasi struktural yang serius, tidak ada mekanisme yang mengikat untuk penyelesaian konflik jadwal, tidak ada prosedur tetap untuk komunikasi orang tua-sekolah-pesantren, dan tidak ada pembagian tanggung jawab yang terdokumentasi ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Pesantren tidak memiliki akses formal terhadap data akademik santri di sekolah mitra, sementara sekolah mitra tidak memiliki pemahaman sistematis tentang beban kegiatan santri di pesantren. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh kajian ini diberi label sebagai *opacity of dual responsibility* ketidaktransparanan tanggung jawab ganda yang berdampak langsung pada kualitas pendampingan santri. Berdasarkan hasil penelitian, hasil komparasi karakteristik sistem pesantren dan SMP Formal Mitra akan disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Analisis Komparasi Karakteristik Sistem Pesantren dan SMP Formal Mitra

Aspek	Sistem Pesantren	Sistem SMP Formal (Mitra)
Orientasi Kurikulum	*Tafaqquh fii ad-Din*: pembentukan karakter Islami & *akhlakul karimah*	Pencapaian kompetensi akademik nasional bersumber dari Kurikulum Merdeka
Otoritas Pendidikan	Kyai atau pengasuh sebagai pusat otoritas keilmuan & pengasuhan	Kepala sekolah dan dewan guru lain yang tersusun dalam struktur birokrasi formal
Metode Pembelajaran	Sorogan, bandongan, *halaqah*, hafalan, *talaqqi, musyafahah*; tekstual-kontekstual	Ceramah, diskusi, proyek, asesmen formatif dan sumatif
Sistem Evaluasi	Ijazah nonformal, rekomendasi kyai, kemampuan hafalan, kemampuan membaca kitab	Rapor formal, Asesmen Nasional, Akreditasi Kemendikbud
Pola Waktu	24 jam yang terbagi dalam habituasi ibadah, mengaji, dan pengasuhan dalam satu lingkungan asrama	07.00 – 14.00 WIB; terpisah dari kehidupan asrama
Legalitas	UU No. 18/2019; diakui sebagai lembaga pendidikan keagamaan	UU No. 20/2003; terakreditasi BAN-S/M; ijazah diakui negara

Sumber: Hasil Observasi & Wawancara Penelitian (2024)

Pada tabel di atas memvisualisasikan jurang perbedaan fundamental antara dua sistem yang secara bersamaan dijalani santri. Perbedaan tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi menyentuh dimensi filosofis pendidikan. Di antaranya ialah pesantren berorientasi pada pembentukan insan kamil melalui internalisasi nilai-nilai Islam, sementara sekolah formal berorientasi pada pencapaian standar kompetensi yang terukur dan tersertifikasi. Ketika dua orientasi ini tidak dipertemukan dalam kerangka integratif, santri berisiko mengalami fragmentasi identitas pendidikan merasa menjadi dua orang berbeda tergantung di lembaga mana ia sedang berada.

B. Mekanisme koordinasi dan distribusi waktu santri

Temuan kedua berkaitan dengan mekanisme koordinasi yang berlangsung antara pesantren dan SMP mitra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih bersifat reaktif dan episodik, yaitu hanya dilakukan ketika muncul persoalan yang memerlukan penyelesaian segera, seperti ketidakhadiran santri di sekolah akibat kegiatan pesantren atau penurunan capaian akademik secara signifikan. Penelitian ini tidak menemukan adanya forum koordinasi yang diselenggarakan secara

periodik, evaluasi bersama yang terstruktur, maupun mekanisme umpan balik yang berlangsung secara berkelanjutan. Pola tersebut mengindikasikan bahwa koordinasi lebih berorientasi pada penyelesaian masalah daripada sebagai instrumen tata kelola kolaboratif yang digunakan untuk melakukan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi program pendidikan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antar lembaga belum berkembang ke arah koordinasi yang bersifat preventif, sehingga berbagai persoalan baru dibahas setelah memberikan dampak terhadap proses pendidikan santri.

Karakter koordinasi yang demikian dapat dipahami dari kompleksitas penyelenggaraan pendidikan ganda yang menempatkan santri dalam dua sistem pendidikan dengan tuntutan yang berbeda namun harus dijalankan secara bersamaan. Berdasarkan hasil observasi partisipan yang dikonfirmasi melalui wawancara, santri memulai aktivitas sejak pukul 03.30 dini hari dan baru beristirahat sekitar pukul 22.00 malam, sehingga rata-rata hanya memperoleh waktu tidur sekitar 5,5 jam setiap malam. Dari sekitar 18,5 jam waktu aktif, kurang lebih 12 jam dialokasikan untuk aktivitas kepesantrenan, seperti ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, pengajian kitab, dan pembinaan karakter, sedangkan sekitar 6,5 jam digunakan untuk mengikuti pendidikan formal di SMP mitra. Padatnya distribusi aktivitas tersebut menunjukkan bahwa ruang penyesuaian jadwal menjadi sangat terbatas, sehingga perubahan agenda pada salah satu lembaga secara langsung berpotensi memengaruhi aktivitas di lembaga lainnya. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang bersifat insidental cenderung dipilih karena dianggap lebih praktis untuk merespons persoalan yang muncul secara langsung. Namun, ketergantungan pada koordinasi reaktif juga menyebabkan berbagai potensi permasalahan, seperti benturan jadwal, penurunan performa akademik, maupun kelelahan belajar santri, kurang teridentifikasi sejak dini. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pendidikan ganda tidak hanya ditentukan oleh komitmen kedua lembaga, tetapi juga oleh keberadaan mekanisme koordinasi yang terencana, rutin, dan berorientasi pada pencegahan sehingga mampu mengantisipasi persoalan sebelum berkembang menjadi hambatan yang lebih kompleks.

Tabel 2. Distribusi Waktu Harian Santri dalam Sistem Pendidikan Ganda

Waktu	Kegiatan	Lembaga	Durasi
03.30 – 05.30	Tahajud, Shalat Subuh, Mengaji Al-Quran	Pesantren	2 jam
05.30 – 07.00	Persiapan sekolah, mandi, sarapan	Pesantren	1,5 jam
07.00 – 13.30	Pembelajaran di pendidikan formal SMP mitra	SMP formal	6,5 jam
13.30 – 15.30	Istirahat, Shalat Zuhur, Shalat Ashar berjamaah	Pesantren	2 jam
15.30 – 17.30	Mengaji kitab, sorogan, *halaqah*	Pesantren	2 jam
17.30 – 20.00	Pelaksanaan Shalat Maghrib, Isya' berjamaah, & makan malam	Pesantren	2,5 jam
20.00 – 22.00	Belajar mandiri, musyawarah, diskusi tugas sekolah formal	Pesantren	2 jam
22.00 – 03.30	Istirahat malam (tidur)	Pesantren	5,5 jam

Sumber: Rekonstruksi Hasil Observasi dan Wawancara Santri (2024)

Data distribusi waktu pada Tabel 2 mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan: santri hanya memiliki waktu belajar mandiri dan pengerjaan tugas sekolah formal

sekitar dua jam per malam (20.00-22.00 WIB), setelah menjalani serangkaian kegiatan intensif sejak dini hari. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas pengerjaan tugas sekolah, mengurangi kapasitas konsentrasi santri saat mengikuti pelajaran formal, dan secara kumulatif mengakibatkan kelelahan kronis. Prayitno dkk. (2022) menemukan temuan serupa di pesantren Jawa Timur, di mana santri dengan beban jadwal yang padat mengalami penurunan prestasi akademik formal secara bertahap, meskipun motivasi belajar keagamaan mereka tetap tinggi.

Menariknya, meskipun kondisi waktu sangat terbatas, sebagian besar santri yang diwawancarai tidak mengekspresikan keluhan berat terhadap beban tersebut. Mereka cenderung memaknai beban ganda sebagai ujian kesabaran dan bukti kesungguhan menuntut ilmu. Pemaknaan ini mencerminkan kuatnya internalisasi nilai-nilai pesantren tentang mujahadah (kesungguhan berjuang) dan tawadu (kerendahan hati dalam belajar), yang berfungsi sebagai mekanisme *koping* psikologis yang efektif. Namun, kajian ini menggarisbawahi bahwa pemaknaan positif ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kondisi struktural yang tidak kondusif tanpa upaya perbaikan kelembagaan.

C. Pengalaman belajar santri: Resiliensi, adaptasi, dan identitas

Penemuan ketiga ini sekaligus menjadi temuan utama dalam kajian ini yaitu pengalaman hidup santri dalam menjalani sistem pendidikan ganda yang menempatkan mereka pada dua lingkungan belajar dengan karakteristik, budaya, dan tuntutan yang berbeda. Analisis terhadap narasi santri menunjukkan tiga tema utama yang saling berkaitan, yaitu: (a) berkembangnya resiliensi akademik dan psikologis; (b) kemampuan beradaptasi terhadap dua budaya pendidikan yang berbeda; serta (c) terbentuknya identitas ganda yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepesantrenan dengan tuntutan pendidikan formal. Ketiga dimensi tersebut tidak muncul sebagai pengalaman yang berdiri sendiri, melainkan merupakan proses yang saling memengaruhi dalam membentuk kapasitas santri untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tengah kompleksitas pendidikan ganda. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan ganda tidak hanya diukur dari capaian akademik atau keberhasilan menyelesaikan dua kurikulum secara bersamaan, tetapi juga dari kemampuan santri mengembangkan kompetensi personal yang memungkinkan mereka menghadapi tekanan akademik, sosial, dan psikologis secara adaptif.

Resiliensi santri dalam konteks pendidikan ganda tidak terbentuk secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses pembinaan yang berlangsung secara berkesinambungan melalui sistem pengasuhan pesantren. Lingkungan pesantren secara konsisten menanamkan nilai kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kesabaran, serta keberanian menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai-nilai tersebut secara bertahap membentuk kemampuan santri dalam mengelola tekanan belajar, mengatur prioritas, dan mempertahankan motivasi meskipun dihadapkan pada beban aktivitas yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, santri yang telah menetap di pesantren lebih dari dua tahun menunjukkan kemampuan manajemen waktu dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan santri baru. Mereka mengembangkan berbagai strategi adaptif, seperti memanfaatkan waktu istirahat di sekolah untuk mengulang hafalan, menyelesaikan tugas akademik pada sela-sela

aktivitas, serta mendiskusikan materi pelajaran formal bersama sesama santri selama perjalanan pulang dari sekolah.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa resiliensi tidak hanya tercermin dari kemampuan bertahan terhadap tekanan, tetapi juga dari kemampuan menemukan cara-cara yang efektif untuk memanfaatkan sumber daya, waktu, dan dukungan sosial yang tersedia agar kedua tuntutan pendidikan dapat dijalankan secara seimbang. Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa proses pengasuhan pesantren berperan sebagai faktor protektif yang memperkuat kapasitas adaptif santri, sehingga mereka mampu mengubah tekanan akibat pendidikan ganda menjadi pengalaman belajar yang membentuk karakter, kemandirian, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Pola ini selaras dengan temuan (Ratodi dkk., 2025) yang menyebut santri sebagai subyek yang memiliki modal psikologis *(psychological capital)* yang unik berkat pengasuhan pesantren.

Adaptasi lintas budaya pendidikan kemampuan santri untuk berpindah dari habitus pesantren ke habitus sekolah formal dan sebaliknya merupakan kompetensi yang berkembang seiring waktu. Pada periode awal, banyak santri mengalami kebingungan tentang standar perilaku yang diharapkan: apakah harus diam dan mendengarkan (norma pesantren) atau aktif bertanya dan berdiskusi (norma sekolah modern). Namun, santri senior menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menavigasi dua konteks ini. Maggio (2017) menyebut kapasitas ini sebagai habitus elastis kemampuan menyesuaikan disposisi diri terhadap konteks lapangan yang berbeda suatu kompetensi yang secara paradoksal justru terasah oleh tekanan pendidikan ganda. Temuan yang paling signifikan adalah terkait pembentukan identitas. Berbeda dari asumsi awal bahwa pendidikan ganda berpotensi menciptakan kebingungan identitas, kajian ini justru menemukan bahwa mayoritas santri mengembangkan identitas ganda yang terintegrasi: mereka mengidentifikasi diri sebagai santri yang sedang menuntut ilmu formal sebagai bagian dari kewajiban mencari ilmu *(thalabul 'ilmi)*, bukan sebagai dua entitas yang terpisah. Pendidikan formal dimaknai sebagai perluasan dari kewajiban Islam untuk menguasai ilmu dunia, sehingga tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan mereka. Temuan ini berbeda dari kajian (Munawir dkk., 2025) yang menemukan disonansi identitas pada santri di pesantren perkotaan yang mengalami paparan budaya sekuler lebih intens.

D. Implikasi bagi manajemen pendidikan berbasis kemitraan

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, kajian ini mengidentifikasi sejumlah implikasi manajerial yang memiliki arti strategis bagi penguatan tata kelola pendidikan ganda di lingkungan pesantren. Implikasi pertama adalah kebutuhan yang mendesak untuk melakukan formalisasi kemitraan melalui penyusunan perjanjian kerja sama yang komprehensif antara pesantren dan SMP mitra. Dokumen tersebut tidak hanya memuat klausul mengenai pembagian tanggung jawab dalam pembinaan santri, tetapi juga mengatur mekanisme pertukaran informasi akademik, prosedur koordinasi jadwal pembelajaran, sistem komunikasi antar lembaga, serta forum evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Kebutuhan terhadap formalisasi ini lahir secara langsung dari temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kemitraan selama ini lebih bertumpu pada hubungan personal antar pemimpin lembaga, sedangkan koordinasi masih

berlangsung secara reaktif dan belum didukung oleh mekanisme kelembagaan yang baku. Akibatnya, setiap perubahan kepemimpinan maupun benturan jadwal berpotensi mengganggu keberlangsungan komunikasi dan pelaksanaan program pendidikan.

Implikasi manajerial kedua yang dihasilkan dari kajian ini adalah perlunya pengembangan *bridging curriculum* sebagai kurikulum penghubung yang mampu mengintegrasikan proses pembelajaran di pesantren dan sekolah formal. Kebutuhan tersebut berangkat dari temuan penelitian yang menunjukkan bahwa santri menjalani dua sistem pendidikan dengan orientasi, struktur kurikulum, metode pembelajaran, serta mekanisme evaluasi yang berbeda. Selama ini kedua sistem cenderung berjalan secara paralel sehingga potensi saling melengkapi antar kurikulum belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, kompetensi yang diperoleh santri di salah satu lembaga sering kali belum diakui sebagai sumber belajar yang dapat memperkuat proses pembelajaran di lembaga lainnya. Kondisi ini menyebabkan beban belajar santri tidak hanya tinggi dari sisi kuantitas waktu, tetapi juga dari sisi fragmentasi pengalaman belajar yang masih terpisah antara pendidikan kepesantrenan dan pendidikan formal.

Pengembangan *bridging curriculum* menjadi penting karena memungkinkan terjadinya integrasi kompetensi secara lebih sistematis melalui pengakuan terhadap capaian belajar yang diperoleh santri pada masing-masing institusi. Misalnya, kemampuan berbahasa Arab yang berkembang melalui pembelajaran kitab dan kajian keislaman di pesantren dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pembelajaran bahasa di sekolah formal, sedangkan penguasaan konsep sains dan matematika dapat menjadi landasan dalam memperdalam pemahaman santri terhadap ayat-ayat *kauniyah* dalam Al-Qur'an. Integrasi semacam ini tidak hanya mengurangi dikotomi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum, tetapi juga membangun pengalaman belajar yang lebih kontekstual, saling menguatkan, dan bermakna bagi santri. Dengan demikian, *bridging curriculum* berfungsi sebagai instrumen integrasi akademik yang menghubungkan dua ekosistem pendidikan, sehingga proses belajar tidak lagi dipandang sebagai dua kewajiban yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam membentuk kompetensi intelektual, spiritual, dan karakter peserta didik. Model kurikulum penghubung seperti ini juga telah diterapkan pada sejumlah pesantren di Malaysia dan Mesir, yang menunjukkan bahwa integrasi kurikulum mampu meningkatkan kesinambungan proses pembelajaran sekaligus memperkuat relevansi pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan formal. (Wan Daud, 2020).

Implikasi ketiga yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah perlunya pengembangan mekanisme dukungan psikologis yang terstruktur sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan ganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa santri harus menjalankan dua sistem pendidikan dengan tuntutan akademik, sosial, dan spiritual yang berlangsung secara bersamaan dalam rentang waktu yang sangat padat. Kondisi tersebut menempatkan santri pada situasi yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi agar mampu mempertahankan performa belajar sekaligus memenuhi kewajiban kepesantrenan. Meskipun hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar santri mampu mengembangkan resiliensi melalui proses pembinaan di pesantren, kemampuan tersebut tidak seharusnya dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan mereka terhadap dukungan psikologis. Sebaliknya, resiliensi perlu dipahami

sebagai kapasitas yang harus terus dipelihara melalui lingkungan belajar yang suportif, karena tekanan akademik yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi menimbulkan kelelahan fisik, kejenuhan belajar, maupun penurunan kesejahteraan psikologis apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Atas dasar tersebut, pengasuh pesantren dan guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah formal perlu membangun kolaborasi yang lebih sistematis dalam memantau perkembangan psikologis santri, khususnya pada periode-periode yang memiliki tingkat tekanan tinggi, seperti pelaksanaan ujian sekolah yang bertepatan dengan kegiatan besar pesantren, agenda hafalan, atau evaluasi pembelajaran lainnya. Kolaborasi tersebut tidak cukup diwujudkan melalui penanganan ketika masalah telah muncul, tetapi perlu dikembangkan dalam bentuk pemantauan berkala, pertukaran informasi mengenai kondisi santri, mekanisme deteksi dini terhadap gejala kelelahan atau stres akademik, serta pemberian pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing santri. Dengan demikian, dukungan psikologis tidak hanya berfungsi sebagai upaya kuratif untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi, tetapi juga menjadi strategi preventif yang memperkuat kesejahteraan, motivasi belajar, dan keberlangsungan proses adaptasi santri dalam menjalani pendidikan ganda secara berkelanjutan..

Implikasi manajerial keempat yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah perlunya penguatan keterlibatan orang tua sebagai bagian dari tata kelola pendidikan ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua masih sangat terbatas dan cenderung bersifat pasif. Sebagian besar orang tua memberikan kepercayaan penuh kepada pihak pesantren dan sekolah mitra untuk mengelola seluruh proses pendidikan anak, tanpa memperoleh informasi yang memadai mengenai dinamika koordinasi, pembagian tanggung jawab, maupun berbagai tantangan yang dihadapi kedua lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan ganda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orang tua belum ditempatkan sebagai mitra strategis dalam proses pengambilan keputusan maupun evaluasi penyelenggaraan pendidikan, melainkan lebih berperan sebagai penerima informasi atas hasil pendidikan yang telah berlangsung.

Keterbatasan keterlibatan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap perkembangan akademik, sosial, dan psikologis santri, terutama ketika muncul persoalan yang memerlukan koordinasi lintas lembaga. Dalam konteks pendidikan ganda, orang tua sesungguhnya memiliki posisi yang penting karena menjadi pihak yang paling memahami kebutuhan, karakter, dan perkembangan anak di luar lingkungan pesantren maupun sekolah formal. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan pembentukan forum komunikasi trilateral yang melibatkan orang tua, pesantren, dan sekolah mitra sebagai ruang dialog, koordinasi, serta evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Forum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme partisipatif untuk membangun kesepahaman mengenai perkembangan santri, menyelaraskan strategi pembinaan, serta mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini. Dengan demikian, keterlibatan aktif orang tua akan memperkuat akuntabilitas kemitraan antar lembaga sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil tetap berorientasi pada pemenuhan kepentingan terbaik dan hak belajar santri secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Kesimpulan Kajian ini mengungkapkan bahwa pendidikan ganda santri di Yayasan Darul Qur'an Wal Lughoh Al Manshur, Pakis, Malang, berlangsung dalam kondisi kemitraan yang informal, tidak terdokumentasi, dan sangat bergantung pada relasi personal antar lembaga. Kondisi ini menghasilkan koordinasi yang sporadis, distribusi waktu yang padat, dan potensi tumpang tindih tanggung jawab yang berisiko mengurangi kualitas pengalaman belajar santri. Meskipun demikian, santri menunjukkan resiliensi yang signifikan, kemampuan adaptasi lintas budaya pendidikan, dan integrasi identitas yang relatif kokoh—kompetensi yang terbentuk sebagian besar berkat pengaruh pengasuhan pesantren. Secara teoritis, kajian ini memperluas kajian manajemen pendidikan Islam dengan menghadirkan analisis model kemitraan eksternal sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan ganda yang belum banyak dikaji. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan: (1) formalisasi kemitraan melalui MoU yang komprehensif; (2) pengembangan *bridging curriculum* yang mengintegrasikan kompetensi pesantren dan sekolah formal; (3) penguatan mekanisme koordinasi periodik antar lembaga; dan (4) pelibatan aktif orang tua dalam sistem komunikasi trilateral. Agenda penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pengembangan model kemitraan standar untuk pesantren tanpa satuan pendidikan formal, serta kajian longitudinal tentang dampak jangka panjang pendidikan ganda terhadap perkembangan kognitif, afektif, dan spiritual santri.

Daftar Pustaka

Al-Qoroni, M. U., & Romli, M. (2026). Internalisasi Nilai-nilai Kedisiplinan dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Parung Bogor. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Islam*, *1*(1), 39–53. https://doi.org/10.62448/jppai.v1i1.470

Brinkerhoff, J. M. (2002). Assessing and improving partnership relationships and outcomes: a proposed framework. *Evaluation and Program Planning*, *25*(3), 215–231. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0149-7189(02)00017-4

Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES.

Gunawan, L. E., & Citriadin, Y. (2025). Strategi Manajemen Mutu Pembelajaran dalam Mengembangkan Kompetensi Tata Boga di SMK IT NW Pujut. *Jurnal Madinasika Manajemen Pendidikan Dan Keguruan*, *7*(1), 69–77. https://doi.org/10.31949/madinasika.v7i1.15529

Harahap, R. A., Halim, M., Almadani, A., & ... (2025). Islam Nusantara dan Pendidikan Agama: Studi Peran Pondok Pesantren dalam Pembentukan Karakter Generasi. *Reflection: Islamic ...*. https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/view/657

Huda, N., & Mahfud. (2024). Inovasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum. *Ta'dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *12*(2), 1–23. https://doi.org/10.61088/tadibi.v12i2.721

Ihsannuddin, K., & Zakariyah, Z. (2025). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri 5 Jakarta Utara. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, *11*(1), 54–69. https://doi.org/10.26594/dirasat.v11i1.5609

Maggio, R. (2017). Pierre bourdieu's: Outline of a theory of practice. In *Pierre Bourdieu S Outline of A Theory of Practice* (1st ed.). Macat Library. https://doi.org/10.4324/9781912284764

Mahanani, A. O., & Sulistyorini, S. (2023). Manajemen Kurikulum Terpadu; Studi tentang Penerapan Model Kurikulum Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA Al-Rosyid Bojonegoro. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *7*(2), 165–179. https://doi.org/10.32478/evaluasi.v7i2.1529

Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.

Munawir, M., Wardana, W., & Aminullah, A. (2025). Pendidikan Islam Dan Transformasi Sosial Budaya. *Indonesian Research Journal on Education*, *5*(5). https://doi.org/10.31004/irje.v5i5.3382

Nasikhin, M. M., & Fajri, A. (2024). Transformasi Manajemen Kurikulum Pesantren Menuju Standar Pendidikan Nasional.

Paramansyah, A., & Aziz, H. A. (2025). Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari terhadap Pendidikan Akhlak dan Relevansinya di Era Digital dalam Kitab Adabul Alim Wal Muta'allim. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, *7*(1), 51–67. https://doi.org/10.47467/jdi.v7i1.5864

Ratodi, M., Zubaidah, T., Legawati, L., & Natalina, R. (2025). Mental Health Resilience Among Santri: A Salutogenic Perspective on Psychological Well-Being in Pesantren Muhamad. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, *13*(SI2), 101–107. https://doi.org/10.20473/jpk.v13.isi2.2025.101-107

Rupert, P. A., & Holmes, D. L. (1997). Dual Relationships in Higher Education: Professional and Institutional Guidelines. *The Journal of Higher Education*, *68*(6), 660. https://doi.org/10.2307/2959967

Wahyuni, A. D., & Aziz, A. (2026). Manajemen Pendidikan Diniyah Formal: Integrasi Nilai Pesantren dan prinsip Manajemen Modern. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, *6*(1), 3353–3362.

Wan Daud, W. M. N. bin W. (2020). *Islamization of contemporary knowledge and the role of the university in the context of de-Westernization and decolonization*. UTM Press.

Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.